

# Bupati Mamuju Hingga Banggar DPRD Dilaporkan ke Kejari Dugaan Korupsi Proyek Balai Kota Rp48 Miliar

Tayang: Senin, 18 Mei 2026 20:00 WITA | Diperbarui: Senin, 18 Mei 2026 20:17 WITA

Penulis: [Suandi](#) | Editor: [Ilham Mulyawan](#)



**TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU** - Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melayangkan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Kantor Balai Kota Mamuju ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Senin (18/5/2026).

Laporan bernomor 68/B/SEK/HMI/V/1447 H tersebut diserahkan perwakilan Ketua HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur selaku pelapor.

Laporan ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) [Kejari Mamuju](#).

Proyek pembangunan gedung pemerintahan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju dengan nilai anggaran Rp 48 miliar.

Proyek ini dikerjakan mulai 2021 dengan konsep multiyears (kontrak tahun jamak).



KOTA MAMUJU - Balai Kota Mamuju di Jl Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Jumat (13/3/2026). (Tribun-Sulbar.com/Suandi)

Dalam laporan resminya, HMI menilai adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Akibatnya, proyek pengerjaan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah yang signifikan.

Enam Pihak Dilaporkan Termasuk Eksekutif dan Legislatif

HMI Cabang Manakarra secara gamblang menyeret sejumlah nama pejabat penting di lingkup Kabupaten Mamuju, baik dari jajaran eksekutif, legislatif, hingga pihak swasta selaku pelaksana proyek.

## Enam Dilaporkan

Adapun enam pihak yang secara resmi tercantum sebagai terlapor dalam berkas aduan tersebut adalah Bupati Kabupaten Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju.

Kemudian Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju, pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran terkait, pelaksana pekerjaan atau kontraktor pembangunan Kantor [Balai Kota Mamuju](#), serta pihak-pihak lain yang turut serta, membantu, menikmati, atau bersama-sama melakukan perbuatan dugaan rasuah tersebut.

Darmin Syakur menegaskan langkah hukum ini diambil sebagai bentuk manifestasi dari fungsi HMI sebagai organisasi kemahasiswaan, kontrol sosial, serta representasi kepentingan publik.

Menurutnya, pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan ketepatan penggunaan keuangan negara harus dikawal secara ketat agar tidak diselewengkan.

"Kami menyampaikan laporan pengaduan dugaan tindak pidana [korupsi](#) ini karena mendeteksi adanya indikasi kuat tindakan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara. Seluruh pihak yang terlibat, dari penentu kebijakan anggaran hingga pelaksana di lapangan, harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum," tegasnya.(\*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi

Sumber: [Tribun sulbar](#)